

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung, Jakarta

C.S.T Kansil, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Choilisin, dkk. 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, UNY Press, Yogyakarta

Edi Riadi, 2011, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*, Gramata Publishing, Jakarta

Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Gaffar, Janedjri M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta

Heru Widodo, 2018, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada :Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pres, Jakarta

Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sitem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta

Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat

Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta

Ni'Matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok

Nitaria Angkasa dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Penerbit Laduny, Lampung

R. Sri Soemantri Martosoewigono, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung :Alumni,

Rahmat Bagja, Dayanto, 2022, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sukarno Aburaera et al, 2014, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Wilma Silalahi, 2019, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

C. Jurnal

Khairul Fahmi, 2017, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 4

Saldi Isra. 2015. Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 4 No. 1

Tony Yuri RahManto, 2018, Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten, *Jurnal ham (badan penelitian dan pengembangan hak asasi Manusia) Vol. 9 No. 2*

Jurnal Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan-Jabatan Publik Lainnya

MuhamMad Luthfi Hardiyanto, Shalahudin Serba Bagus, Ahmad Munir, 2017, Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis terhadap putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015), *Mimbar Yustitia Vol. 1 No. 2*

Sugiono Margi, & Maulida Khazanah. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 3

Yuri Alfrin Aladdin, 2018, PeMaknaan Putusan MA Terkait Calon Legislatif Mantan Koruptor: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. Coverage: *Journal of Strategic Communication*.

Abdul Syuku Yakub, Auliya Khasanofa, 2019, Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Caleg Eks Koruptor (Studi Putusan No. 46 : P/HUM/2018), *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7 No. 2

D. Website

<https://perludem.org/2023/05/30/perludem-dkk-minta-mk-beri-peringatan-ke-kpu-soal-aturan-eks-koruptor-nyaleg/>. Diakses pada Tanggal 7 Juli pukul 02.23

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/Mahkamah-agung> Diakses pada Tanggal 7 Juni pukul 12.14

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230220-penyalahgunaan-fasilitas-kantor-bibit-korupsi-yang-diabaikan> diakses pada Tanggal 5 September pukul 09.38

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/legisme/> diakses pada Tanggal 11 September Pukul 10.39

